

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk memajukan kesejahteraan umum, Todaro (2006) mengartikan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan, antara lain dengan meningkatkan pendapatan per kapita merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara.

Keadilan sosial mengandung makna pentingnya prinsip pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang adil. Pentingnya pertumbuhan ekonomi merata diantara seluruh rakyat, dinamis dan meningkat. Prinsip demokrasi ekonomi dinyatakan bahwa Seluruh kekayaan alam Indonesia seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat (Djamin dalam Tambunan 2011). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2011).

Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari

meningkatnya pendapatan nasional (GNP) per kapita riil, dalam arti tingkat perumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan (setelah dideflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2010).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Pengangguran, keterbatasan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi barang maupun jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Todaro (2006) pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang bersifat dinamis, yaitu bagaimana perekonomian tersebut berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi

yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau *Product Domestic Bruto riil*. (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Suindyah, 2011).

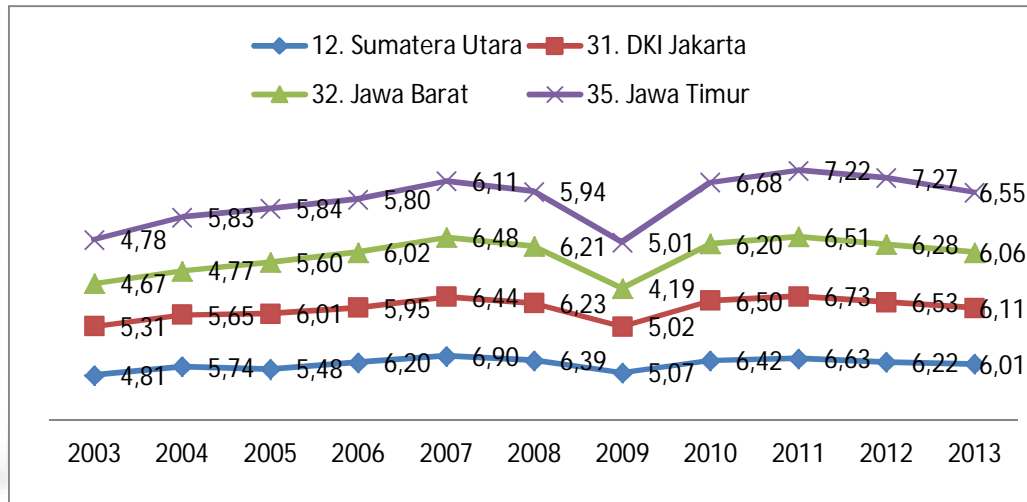
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Pembangunan dapat ditunjukkan salah satunya dari peningkatan Pertumbuhan Produk domestik regional bruto. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2003-2013 mengalami fluktuasi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 5,87%, sedangkan secara nasional rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,38% (BPS: 2014).

Walaupun laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tersebut melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, namun bila dibandingkan dengan beberapa provinsi di Jawa, Provinsi Sumatera Utara masih tertinggal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur (BPS: 2014). Terlihat pada gambar 1.1. berikut ini.

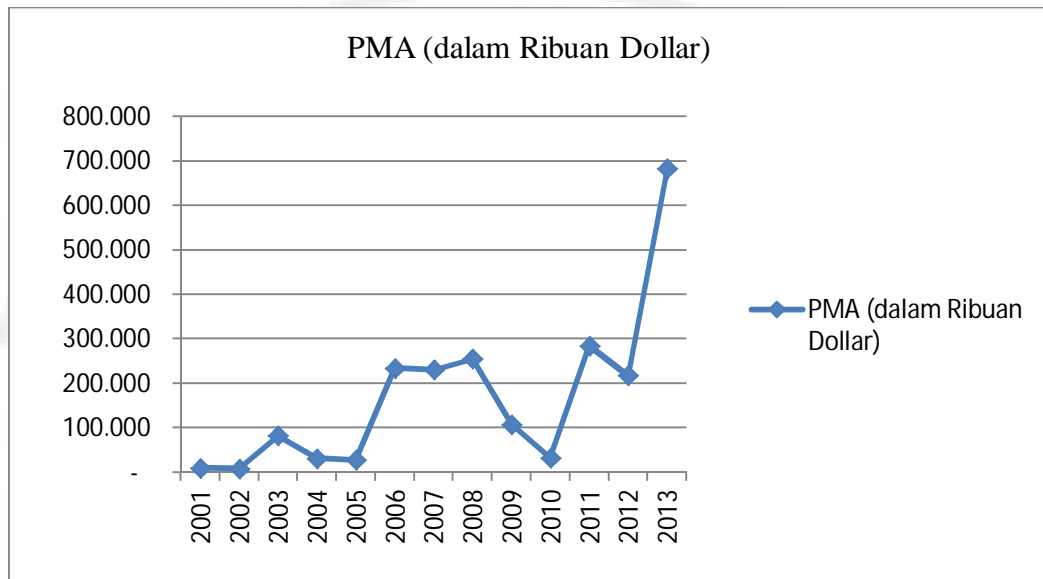


Sumber: BPS, 2003-2013 (data diolah)

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi

Merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif hampir sama dibanding Provinsi lain. Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara melambat ketinggalan dengan DKI Jakarta, juga Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jawa Timur yang pada tahun 2011 mencapai 7,22% dan di tahun 2012 mencapai 7,27%, sementara Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 hanya mencapai 6,63% di tahun 2012 hanya mencapai 6,22%. Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya (Mankiw, 2007).

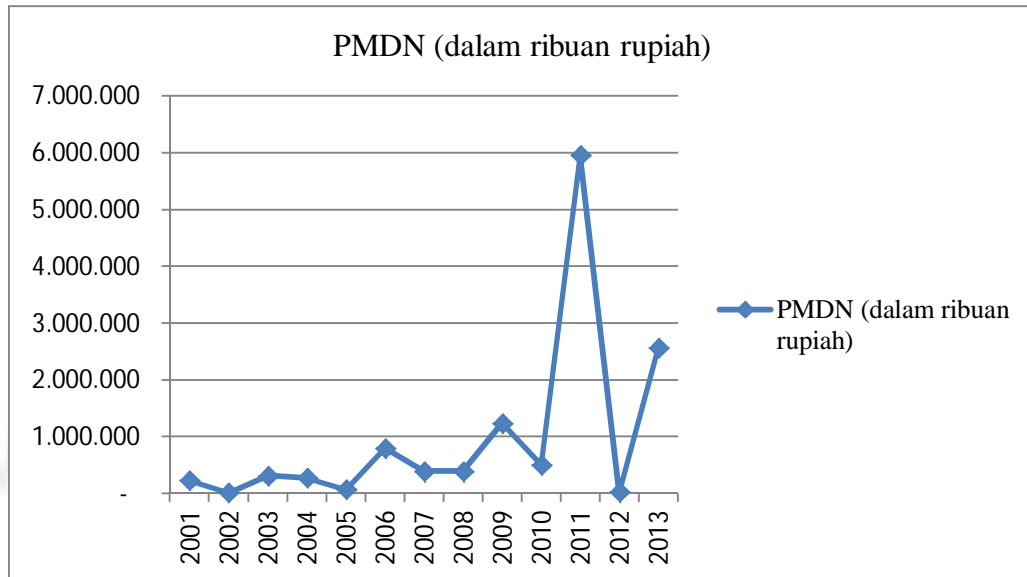
Gambaran investasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode kurun waktu 2001-2013 terlihat pada gambar 1.2 dan 1.3 berikut ini.



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tahun 2001-2013 (data diolah)

Gambar 1.2. Grafik Investasi Penanaman modal Asing tahun 2001-2013.

Berdasarkan gambar diatas, investasi penanaman modal asing Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 682.868 (dalam Ribuan Dolar). Tahun sebelumnya investasi 217.265 (dalam Ribuan Dolar). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah optimal dalam usaha menarik investor yang dapat memberdayakan potensi ekonomi di wilayahnya. Hanya saja apakah dari peningkatan tersebut akan meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan penanaman modal asing seperti diuraikan di atas seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi, khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera utara. Selain investasi yang diterima dari penanaman modal asing, Provinsi Sumatera Utara juga memperoleh modal dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tahun 2001-2013 (data diolah)

Gambar 1.3 Grafik Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2001-2013.

Dari gambar 1.3. dapat dilihat bahwa penanaman modal dalam negeri selama 5 tahun terakhir meningkat pesat, hanya saja pada tahun 2012 merosot turun hanya Rp. 25 milyar. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan juga dapat menimbulkan masalah di Provinsi Sumatera utara.

Menurut Tambunan (2011) jumlah angkatan kerja yang terus meningkat yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan akan memperburuk pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan di posisi kedua sektor terutama sektor industri pengolahan.

Indonesia mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan angkatan kerja

terhadap sektor industri, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sitompul, 2007). Pendapatan yang lebih menjamin dan kehidupan yang lebih modern menyebabkan permintaan angkatan kerja terhadap sektor industri semakin meningkat setiap tahun, bahkan telah terjadi fenomena tersendiri melalui arus urbanisasi yang terus berlangsung (Tambunan, 2011).

Salah satu tujuan nasional adalah perluasan kesempatan kerja yang dapat dilakukan melalui peningkatan investasi. Tujuan ini penting karena peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk diikuti pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Dilain pihak pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pertumbuhan atau perluasan kesempatan kerja.

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Perkembangan penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2001-2013 disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Data Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2013 (Jiwa)

Tahun	Angkatan kerja	Bekerja	Mencari kerja	Bukan angkatan kerja	Tenaga kerja
2001	5.283.268	4.948.539	335.729	3.709.126	8.992.394
2002	5.206.535	4.977.323	229.212	3.817.268	9.023.803
2003	5.283.857	4.928.353	355.504	3.835.219	9.119.076
2004	5.239.910	4.835.793	404.117	2.650.673	7.890.583
2005	5.514.170	4.756.078	758.092	2.482.832	7.997.002
2006	5.803.112	5.166.132	636.980	2.263.896	8.067.008
2007	5.491.696	4.859.647	632.049	2.716.955	8.208.651
2008	5.654.131	5.082.797	571.334	2.724.017	8.378.148
2009	6.094.802	5.540.263	554.539	2.825.171	8.919.973
2010	6.298.070	5.765.643	532.427	2.810.668	9.108.738
2011	6.617.377	6.125.571	491.806	2.902.897	9.520.274
2012	6.314.239	5.912.114	402.125	2.445.082	8.759.321
2013	6.131.664	5.751.682	379.982	2.702.653	8.834.317

Sumber: Survei Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, berbagai tahun penerbitan (data diolah)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu dari 5.283.268 orang menjadi 6.131.664 orang 2013. Dari jumlah tersebut, orang yang bekerja selama kurun waktu 2001-2013 sedikit mengalami peningkatan dari 4.948.539 orang (2001) menjadi 5.751.682 orang (2013) atau meningkat sebesar 0,2 %. Ini berarti jumlah orang yang siap bekerja (angkatan kerja) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan jumlah orang masih mencari pekerjaan dan menganggur mengalami penurunan. Data tentang jumlah tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan

pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi, dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Dari Tabel 1.1. Terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja mendekati pada jumlah angkatan kerja. Dengan demikian jumlah penduduk yang menganggur atau mencari pekerjaan lebih sedikit. Menurunnya angka pengangguran atau mencari pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2001–2013 akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Namun banyaknya angkatan kerja belum tentu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Karena penghasilan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja tersebut. Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Indonesia berhubungan dengan kesejahteraan buruh atau tenaga kerja. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Sumatera utara. Diharapkan adanya investasi di Provinsi Sumatera utara mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mampu menampung angkatan kerja di Provinsi Sumatera utara dengan menyesuaikan upah yang ada. Untuk memperoleh upah/gaji yang tinggi, angkatan kerja tersebut harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas dirinya.

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Angkatan kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, dan Angkatan kerja.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti adanya temuan bahwa analisis Investasi, dan Angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebagai referensi/perbandingan atau sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya untuk menyempurnakan model analisis pengaruh investasi dan

Angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bagi perencanaan pembangunan daerah terutama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.



THE
Character Building
UNIVERSITY